

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2015-2020

Husnun Karina Bilqis¹, Nuwun Priyono²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Tidar

Corresponding Author: husnunkarinab@gmail.com¹, nuwunpriyono@untidar.ac.id²

Article History

Received: 28-01-2023

Revised: 02-02-2023

Accepted: 05-02-2023

Kata Kunci:

Belanja Modal; Covid-19;

Kinerja Keuangan;

Pendapatan Asli Daerah

Keywords:

Capital Expenditure; Covid-19;

Financial Performance; Local

Revenue

ABSTRAK:

Kemajuan daerah pada suatu wilayah dapat ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang baik dan kinerja keuangan yang menjadi cerminan pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya. Covid-19 sangat mempengaruhi dalam pertumbuhan ekonomi dan keuangan. Pengaruh perekonomian tidak hanya berdampak pada tahun ini, tetapi juga diperkirakan berpengaruh beberapa tahun kedepan. Maka pemerintah harus sigap dalam mengatasi permasalahan dan dalam mengelola penyerapan APBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah dari sebelum dan pada saat terjadinya pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data keuangan sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik beberapa daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2015-2020. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling dan analisis teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.

ABSTRACT:

Regional progress in an area can be characterized by good economic growth and financial performance which is a reflection of the government in managing its regional finances. Covid-19 has greatly affected economic and financial growth. The influence of the economy will not only have an impact this year, but is also expected to affect the next few years. So the

government must be swift in overcoming problems and in managing the absorption of regional budgets. This study aims to determine how capital expenditure affects regional financial performance from before and during the Covid-19 pandemic. The method used in this study is a quantitative research method. This study uses secondary financial data sourced from the Central Statistics Agency of several regions in the Regency/City Government throughout Central Java Province from 2015-2020. The sample used in this study is purposive sampling and the analysis technique used in this study is the multiple linear analysis technique. The results of this study resulted in the original regional income having an influence on the financial performance of the government. Capital expenditures have no effect on the government's financial performance.

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dimana otonomi daerah menjadi peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan (Apriana & Suryanto, 2010). (Halaskova & Halaskova, 2016) menyatakan bahwa setiap daerah yang memiliki kemungkinan untuk dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam mengelola keuangan daerah yang baik dapat mempengaruhi perkembangan suatu daerah, menjamin terwujudnya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, serta mempengaruhi peningkatan kinerja suatu daerah tersebut. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pengelolaan daerah dapat melakukan secara ekonomis, efektif dan efisien, akuntabilitas, dan transparan.

Pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 sangatlah memiliki pengaruh pada kehidupan masyarakat dan pada beberapa sektor seperti kesehatan, perdagangan, bahkan perekonomian. Dampak perubahan pertumbuhan ekonomi yang terjadi mengakibatkan adanya penurunan pendapatan negara, dimana pendapatan negara umumnya berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat. Pandemi ini menyebabkan pemerintah harus melakukan perencanaan ulang terhadap APBD yang sudah dirancang sebelumnya, karena anggaran tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana. Pengurangan APBD yang terjadi di setiap daerah akibat dampak pandemi dapat mempengaruhi pembangunan pada setiap daerah. Anggaran belanja yang sudah disusun juga mengalami realokasi dalam menjalankan kegiatan karena pandemi, maka realokasi belanja bantuan sosial dan belanja modal dialokasikan untuk penganggaran dalam upaya penanganan Covid-19 terutama untuk kesehatan dan ekonomi. Pengalokasian belanja modal sangat dipengaruhi oleh besaran penerimaan di daerah tersebut. Alokasi belanja modal dapat disesuaikan pada kebutuhan daerah untuk menjalankan tugas pemerintah ataupun untuk pelayanan dan fasilitas publik.

Pemerintah daerah dapat menaikkan penerimaan daerahnya dengan cara mengelola sumber daya di daerah tersebut, kemudian pendapatan asli daerah (PAD) dapat dimasukkan guna sebagai sumber pendanaan belanja modal pada masa yang akan datang. Penerimaan PAD berpengaruh terhadap belanja modal, apabila penerimaan PAD tinggi maka akan memberikan pengaruh positif pada alokasi belanja modal, begitu sebaliknya jika penerimaan

PAD rendah maka dapat mempengaruhi kurangnya alokasi belanja modal (Muhammad Luthfi Haryamto, 2014).

Pendapatan asli daerah pada Kota/Kab Provinsi Jawa Tengah sebelum dan setelah adanya covid-19 tidak selalu terjadi perubahan kenaikan alokasi anggaran di beberapa Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah seperti Kabupaten Semarang, Pati, Kabupaten Sukoharjo, Kebumen, Kabupaten Demak, dan Pemalang. APBD dalam menanggapi Covid-19 terkait masalah pengelolaan, dapat digunakan sebagai alat untuk membuktikan besarnya pendapatan dan pengeluaran, perencanaan dan pembangunan, serta sumber sebagai ukuran standar evaluasi kinerja dan koordinasi aktivitas unit kerja perangkat daerah. Kinerja keuangan daerah yaitu sebuah parameter yang dimanfaatkan untuk menilai suatu kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan merupakan contoh gambaran dalam penilaian akuntabilitas dan tanggung jawab keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi. Analisis kinerja keuangan di gunakan untuk melihat alur proses kinerja keuangan pemerintah berlandaskan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut (Darwanis & Saputra, 2014).

Provinsi Jawa Tengah dengan 3,26 juta hektar luas wilayah atau kisaran 26% dari luas Pulau Jawa dan 1,71% dari luas Indonesia. Seiring bertambahnya jumlah penduduk pada saat pandemi, membuat pemerintah harus mempertimbangkan pendapatan dan pengeluaran daerah, belanja daerah, hingga perlunya memaksimalkan kinerja pemerintah.

Rasio kemandirian daerah menghubungkan kapasitas daerah saat membiayai aktivitas pemerintah yang berasal dari PAD. Semakin tinggi suatu rasio derajat daerah maka tingkat ketergantungan daerah tersebut kepada bantuan dari pihak eksternall sangatlah minim dan semakin berkurangnya rasio kemandirian daerah maka ketergantungannya daerah tersebut terhadap bantuan pihak ekstrnall semakin besar (Susanto, 2019). Formulasi yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah:

$$RKKD = \frac{PAD}{Bantuan\ Pemerintah} \times 100$$

Berdasarkan pejelasan latar belakang diatas yang dijelaskan, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melalukan penelitiann “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2020”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebelum dan selama pandemi Covid-19? (2) Apakah sebelum adanya dan selama pandemi Covid-19 Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota?

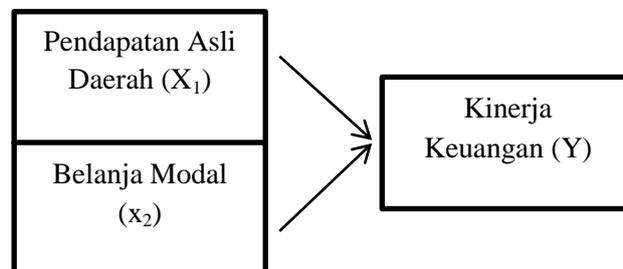
Manfaat teoretis yang diperoleh pada penelitian ini yaitu diharapkan mampu berkontribusi nyata tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal bagi kinerja keuangan daerah. Melalui penelitian ini, manfaat yang diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pemrintah daerah dalam membentuk strategi dalam melaksanakan peningkatan efisiensi kinerja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Pendapatan asli daerah diperoleh melalui sumber dana didaerah tersebut apabila pendapatan daerah digunakan dan disesuaikan kebutuhan dan pembangunan daeraah, maka kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah juga tinggi. Tingginya penerimaan suatu PAD dapat meningkatkan kemandirian suatu daerah tersebut sehingga berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah suatu daerah (Rohman, 2012)

Menurut Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2006, belanja modal merupakan belanja suatu daerah yang digunakkan untuk mendanai suatu pengembangan bangunan aset daerah. Semakin banyak pembangunan yang dilaksanakan maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih terjamin. Semakin besar belanja modal pada daerah tersebut maka

dapat mengidentifikasi terhadap kinerja yang buruk. (Sudarsana & Rahardjo, 2013) mengemukakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori principal. Dengan menggunakan teori principal, peneliti ingin mengetahui informasi keuangan pada suatu daerah tertentu yang telah diaudit.



LANDASAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan daerah berasal dari ekonomi di wilayah daerahnya sendiri. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 3 ayat 1 yang mengatur mengenai Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan tujuan PAD yaitu untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam berpartisipasi menyelenggarakan otonomi daerah yang sesuai dengan kemampuan daerah tersebut sebagai bentuk desentralisasi. Sebagai sumber pendapatan utama, PAD didedikasikan untuk melaksanakan pembangunan oleh pemerintah daerah tersebut sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat pembangunan daerah tersebut. Semakin banyak dana PAD yang didapatkan, maka daerah dapat setara dengan pembangunan di daerah tersebut.

Belanja Modal

Belanja modal adalah suatu belanja pemerintah daerah yang berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, pemerintah daerah seharusnya dapat melakukan perputaran belanja dengan meningkatkan alokasi belanja modal guna meningkatkan kepercayaan publik dan produktivitas masyarakat. Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang memiliki manfaat lebih dari tahun anggaran, menambah suatu aset daerah dan memperbanyak belanja operasi yang bersifat awam. Belanja modal pelayanan publik di gunakan dalam mendanai kegiatan investasi perbaikan infrastruktur publik dimana hasilnya dapat berguna bagi masyarakat. Belanja modal dibagi menjadi belanja modal instansi, belanja modal bangunan irigasi, belanja tanah, jalan dan jembatan, serta belanja modal yang dapat digunakan untuk pelayanan publik sesuai kebutuhan guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (Setiawan, 2019)

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan pemerintah merupakan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya dengan mengelola sumber keuangan asli daerah untuk mendukung pemerintah pelayanan masyarakat, dan dalam pembangunan daerah (Christin Marciah Poyoh et al., 2017). Dalam menentukan kinerja keuangan, peneliti menggunakan rasio kemandirian daerah.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya yang sudah diteliti, maka hipotesis pada riset ini:

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

H₂: Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif untuk mengetahui bagaimana pendapatan daerah dan belanja modal mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, dimana data yang digunakan adalah jenis data kuantitatif di peroleh dan diolah oleh instansi terkait.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder laporan APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015-2020 yang sudah diaudit dan berasal dari Badan Statistik Pusat Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu purposive sampling. Riset analisis yang digunakan adalah berupa regresi linier berganda dengan variable independen pendapatan asli daerah dan belanja modal, sedangkan kinerja keuangan pemerintah sebagai variable dependen. Untuk pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan Uji F serta Uji T untuk mengetahui apakah variable independen berpengaruh simultan pada variable terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.

		KINERJA
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	2060.6389
	Std. Deviation	553.28015
Most Extreme Differences	Absolute	.109
	Positive	.109
	Negative	-.077
Test Statistic		.109
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculate from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

Uji asumsi klasik diawali dengan uji normalitas. Dari hasil tabel 1 diatas dapat dinyatakan bahwa hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov* menyatakan nilai signifikansii sebanyak 0.200. Hasil tersebut menyatakan nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dibandingkan dari tingkat kesalahan 5% atau alpha yaitu $0.200 > 0.05$. Maka, kesimpulannya yaitu data yang dipakai pada penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 2
Multikolinearitas
Coefficient^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD	.942	1.062
BELANJA MODAL	.942	1.062

a. Dependent Variabel: KINERJA
Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Uji multikolinearitas dilihat dari nilai *variance inflation factor* (VIF) untuk dianalisis. Suatu model regresi dapat dinyatakan bebas multikolinearitas apabila nilai tolerance kurang dari 0,10. Berdasarkan output diatas, didapat VIF dari variabel PAD dan belanja modal sebesar 0.942 dan 1.062. Hal itu menyatakan nilai tolerance PAD dan belanja modal lebih besar dari 0,10. Hasil nilai VIF untuk variabel PAD dan Belanja Modal adalah $1,062 < 10,00$. Maka pernyataan pada uji multikolinearitas ini dinyatakan tidak ada gejala multikolinearitas.

Tabel 3
Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	294.751	432.113		.682	.500
PAD	5.830E-9	.000	.728	6.611	.000
BELANJA MODAL	-9.455E-10	.000	-.177	-1.607	.118

a. Dependen Variabel: KINERJA
Sumber data: Data diolah peneliti (2022)

Berdasarkan Tabel 2, persamaan regresi liner berganda pada penelitian ini menggunakan rumus:

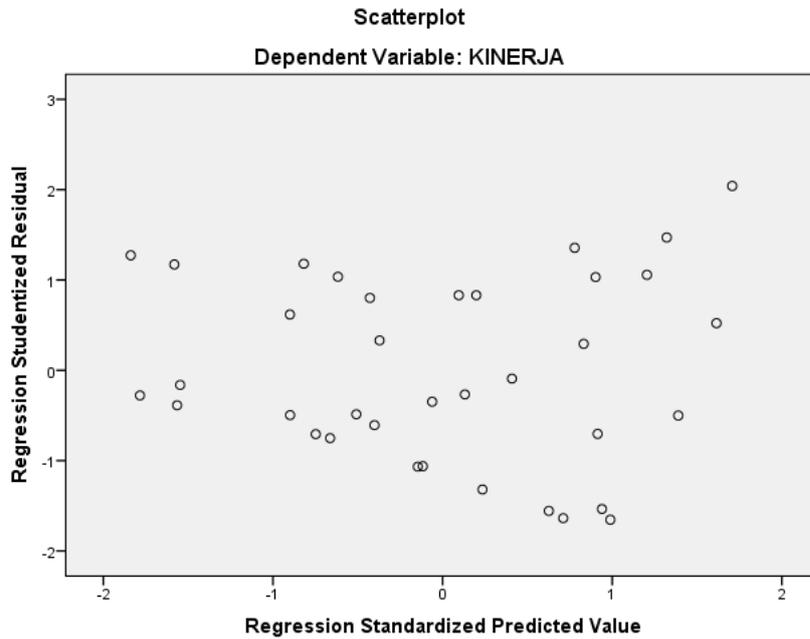
$$Y = 294.751 + 5.830X_1 - 9.455X_2 + e \dots \dots \dots (3)$$

Keterangan:

- Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- X₁ = Pendapatan Asli Daerah
- X₂ = Belanja Modal
- e = Tingkat kesalahan pengganggu (standar error)

Persamaan regresi di atas menyatakan hail konstansta 294.751. Artinya, pendapatan asli daerah yang kongsan mampu meningkatkan kinerja keuangan suatu daerah dengan anggarpaan variabel lain bernilai konstant. Nilai kofisien regresi belanja modal sebesar -9.455 menunjukan belanja modal meningkat yang menyebabkan menurunnya kinerja keuangan.

Tabel 4
Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

Uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik pada gambar diatas terdistribusi secara acak dan tidak beraturan diatas ataupun dibawah angka 0 sumbu Y. Ini dinyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam regresi ini.

Tabel 5
Autokorelasi
Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.789 ^a	.623	.600	349.77219	.2070

a. Predictor: (constant), BELANJA MODAL, PAD

b. Dependen Variabal: KINERJA

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Uji autokorelasi pada penelitian ini diteliti dengan Uji Durbin-Watson. Hasil uji diatas menghasilkan nilai Durbin-Watson (DW-tst) sebesar 2.070. Total data yang di gunakan dalam penelitian ini sejumlah 30, jumlah variabel bebas yait 2 variabel. Maka hasil tersebut diperoleh $4-dL=2,71$ dan nilai $4-du=2,43$. Maka pernyataan dari hasil diatas, autokorelasi yang terbebas yaitu $du (1,57)$ sampai $4-du (2,43)$, dan nilai DW-Test terdeteksi bebas dari autokorelasi.

Tabel 6
Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	294.751	432.113		.682	.500
PAD	5.830E-9	.000	.728	6.611	.000
BELANJA MODAL	-9.455E-10	.000	-.177	-1.607	.118

a. Dependent Variable: KINERJA

Uji parsial atau Uji-T di gunakan sebagai penguji pengaruh dari variable bebas terhadap variable terkait. Berdasarkan output tabel 6 menunjukkan nilai signifikansi dari PAD sebesar 0,000 dan kurang dari 0,05. Maka menyatakan bahwa pendapatan daerah memiliki pengaruh bagi kinerja keuangan daerah. Mengenai hasil nilai signifikansi belanja daerah sebesar 0.118 menunjukkan bahwa lebih besar dari nilai 0,05, maka dapat dikarakan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Tabel 7
Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6676922.937	2	3338461.469	27.288	.000 ^b
	Residual	4037239.368	33	122340.587		
	Total	10714162.306	35			

a. Dependen Variabel: KINERJA

b. Predictor: (constant), BELANJA MODAL, PAD

Uji-F memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Uji-F dilakukan guna mengetahui bagaimana seluruh variable bebas berpengaruh bersamaan bagi variabel yang terikat. Jika nilai $F < 0,05$ maka variabel independen dinyatakan secara simultan mempengaruhi variable dependenn. Berdasarkan output pada tabel 7 diperoleh nilai F hitung sebesar 27.2, dan nilai signifikasi yang dihasilkan adalah 0,000 kurang dari 0,05. Maka dinyatakan variabel dependen memiliki pengaruh yang simultan terhadap variable dependen.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang sudah dilaksanakan, pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2020. Hasil ini membuktikan bahwa pandemic Covid tidak menghalangi PAD yang dihasilkan untuk berkontribusi bagi pertumbuhan suatu daerah. Pendapatan daerah yang tinggi dapat meminimalisir ketergantungan daerah untuk menerima hibah dana yang diberikan oleh pusat. (Brigham & Houston, 2019) berpendapat bahwa suatu daerah dikatakan tinggi dalam mewujudkan pendapatan asli daerah apabila dalam menggunakan pendapatan daerah sesuai dengan pembangunan dan kebutuhan daerah. Suatu daerah dapat membuktikan kemampuan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan guna membiayai kegiatannya sendiri, maka

dapat dikatakan pemerintah telah memiliki kinerja yang baik. Pandemi Covid-19 tidak menghalangi pemerintah daerah dalam melaksanakan opininya dalam memberi pelayanan yang maksimal bagi masyarakat dengan membangun fasilitas daerah yang hasilnya dapat dinikmati dan digunakan secara bersama sama. Penelitian yang sama oleh (Antari & Sedana, 2018) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2020. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya dapat berkontribusi bagi pertumbuhan pendapatan daerah pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi belanja modal menghasilkan nilai negatif signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah yaitu saat pandemi, dana dialihkan untuk membantu mencukupi kebutuhan masyarakat, dan dana yang digunakan untuk anggaran belanja modal seharusnya tidak lebih dari anggaran yang suda di sesuaikan. Belanja modal merupakan sebagai investasi pemerintah daerah, tetapi bukan bertujuan untuk mencari profit. Penelitian ini identic dengan penlitian yang dilaksanakan oleh (Rohman, 2012) menghasilkan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja keuangan karena kinerja pegawai tersebut masih belum optimal dan anggaran belanja belum terserap secara maksimial

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah jelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat terjadi pandemi Covid-19. Hasil tersebut mengindikasi bahwa pendapatan asli daerah yang di hasilkan oleh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat pandemi tidak berubah dalam arti mampu memberikan sebuah kontribusi bagi pertumbuhan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Belanja modal memiliki pengaruh negatif signifikansi bagi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat terjadi karena belanja modal yang diberikan tidak terserap dengan baik, terlebih pada saat pandemi anggaran tidak disalurkan dengan baik yang dapat menyebabkan kinerja keuangan yang kurang maksimal.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran yaitu pendapatan asli daerah yang dihasilkan diharapkan dapat mendukung pertumbuhan pendapatan daerah. Pemerintah daerah juga harus lebih mampu dalam mengelola peningkatan pendapatan asli daerah di masa mendatang dan dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan daerahnya sendiri karena pemerintah daerah mempunyai hasil kinerja yang baik dalam mengelola perekonomian daerahnya sendiri.

Saran bagi peneliti atau penulis yang akan datang, diharapkan mampu menambah jumlah variable data penelitian bersangkutan terkait pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan dengan memperkuat data dan alasan yang terjadi sebelum dan pada saat pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>
- [2] Apriana, D., & Suryanto, R. (2010). Analisis Hubungan antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 11(1), 68–79. <https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/viewFile/1075/1156>
- [3] Brigham & Houston. (2019). *Buku CD / DVD ATK Komputer Manajemen Keuangan (Buku 1) (Edisi 8) Masukkan ke Troli Masukkan ke Troli Masukkan ke D ...* 5(1), 1–3.
- [4] Christin Marciah Poyoh, Sri Murni, & Joy E Tulung. (2017). [2017] Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, 5(October), 745–752.
- [5] Darwanis, D., & Saputra, R. (2014). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 183–199. <https://doi.org/10.24815/jdab.v1i2.3628>
- [6] Halaskova, M., & Halaskova, R. (2016). Assessment of financial capabilities of local governments in EU countries for the development of local public services. *Lex Localis*, 14(3), 379–397. [https://doi.org/10.4335/14.3.379-397\(2016\)](https://doi.org/10.4335/14.3.379-397(2016))
- [7] Muhammad Luthfi Haryamto. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Dengan Pandemi Covid-19 Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintahan Provinsi Di Indonesia Tahun. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 000, 396–409.
- [8] Rohman, F. N. dan A. (2012). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1, 1–18. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/8707>
- [9] Setiawan, F. P. (2019). *Pengaruh rasio keuangan terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Tertinggal di Indonesia*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/16301>
- [10] Sudarsana, H. S., & Rahardjo, S. N. (2013). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). In *Diponegoro Journal of Accounting* (Vol. 2, Issue 4). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- [11] Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>